

## Abstrak

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia? 2) Bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat? Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa 1) Pengaturan kepemilikan senjata api saat ini yang mengatur enforcement terhadap penyalahgunaan senjata api belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. 2) Untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dilakukan dengan cara dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap dan memperketat wilayah Perbatasan Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal hendaknya dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional. 2) Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja, yang mengatur mengenai delik senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda.

**Kata Kunci:** Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil Undang-Undang Darurat

## **Abstract**

*The widespread spread of firearms among civilians is a global phenomenon. The unorganized supervision of the possession of firearms, both legal and illegal, owned by the general public, police and the Indonesian National Armed Forces, is one of the causes of crimes involving the misuse of firearms in Indonesia. The problems in this research are*

*1) How is the regulation of firearms ownership by civil society and criminal responsibility in Indonesia? 2) How to achieve optimal law enforcement for perpetrators of misuse of firearms in providing protection for the community? By using a research method with a juridical normative approach and an empirical juridical approach, it is found that 1) The current firearms ownership regulation that regulates enforcement of the misuse of firearms has not been able to provide a sense of security for the community. 2) To achieve optimal law enforcement for perpetrators of firearms misuse, the establishment of a special agency for handling the illegal firearms trade and by tightening the Indonesian border area. Suggestions in this study are 1) Law enforcement against perpetrators of illegal firearms abuse should be carried out by prioritizing human rights by carrying out legal processes in a professional, transparent and proportional manner. 2) It is necessary to have only 1 (one) law, which regulates the offense of firearms so that the terms used are not different.*

*Keywords: Abuse, Firearms, Civil Society Emergency Law*